

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DASAR
MASYARAKAT MISKIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN
DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA



**Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA
2. Dr. Yuslim, S.H., M.H.**

Disusun Oleh : Pipi Susanti

NIM : 1520112036

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DASAR
MASYARAKAT MISKIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN
DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN**

**(Pipi Susanti, 1520112036, Mgister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 102 Halaman, Tahun 2017)**

ABSTRAK

Di Kabupaten Pasaman data jumlah penduduk ada sebanyak 269.000 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu) jiwa, dimana penduduk miskin 8,14% dari jumlah penduduk yang ada yaitu sebesar 21.897 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Pasaman, dimana mereka ini masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hak-hak dasar masyarakat ini belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang masih banyak anak-anak yang putus sekolah, tempat tinggal yang tidak layak huni, tidak mempunyai lapangan kerja. Adapun permasalahan yang menjadi kajian dalam tesis ini adalah: *Pertama* Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab Pemerintah Pasaman Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Dalam Bidang Pendidikan Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011. *Kedua* Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Pasaman Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*), dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dari segi uraian kata-kata yang diperoleh dari tempat penelitian., Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman diberikan melalui Program Beasiswa, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan Sekolah Gratis, selain itu ada bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar. dengan adanya program ini maka hak-hak masyarakat miskin dibidang pendidikan dapat dipenuhi pemerintah Pasaman sebagaimana terdapat Pasal 31 UUD. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman dimana masyarakat kurang tahu tentang mamfaat pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat rendah karena keterbatasan biaya yang dimiliki sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Kata Kunci : Tangung Jawab, Hak Dasar Masyarakat Miskin

**RESPONSIBILITY OF DECENTRAL GOVERNMENT OF PASAMAN
REGENCY TO FULFILL THE PRINCIPLE RIGHTS OF POOR SOCIETY
IN EDUCATION CASE RELATED TO THE LAW NO. 13, 2011 ABOUT
POOR AND MISERABLE**

**(Pipi Susanti, 1520112036, Law Mgister Law Faculty Andalas University,
102 Page, 2017 Years)**

ABSTRACT

There are around 269.000 (Two Hundred Sixty Nine Thousand) people live in Pasaman residence, 8,14% of people is poor people. It is about 21.897 people. They can't fulfill their daily needs and not yet fulfilled the society principle rights. Which is mandated in our laws. There are many children that drop out from their schools, then their house is still far from good, next they also don't have occupations. The focus of the problems at this their are: First, How is the implementation of Pasaman govermen respnonsibility to fulfill the principle rightof poor society in education field which is connected to the law number 13, 2011. Second, What are the problems that are faced by Pasaman goverment to fulfill the poor society base rights. The metode of this research is sosiological research, and data sources is primer and secondary data. That data was analysed qualitatively, so that was gotten the accurate imagination about the words from research place. The result of the research shown that the fulfillment of principle rights of poor society in education case at Pasaman regency was given by scholarship program, supplier extra food for school age children and free school. Beside that, there is also allowance given by the central government for Pasaman regency that programs is done social department education department via Expectant Family Program and Smart Indonesia Program. By these programs, the fulfillment of principle rights of poor society in education ctase can be fulfilled by Pasaman regency as it is mandated by Pasal 31 UUD. The problems that are faced in fulfill the principle right of poor society in education case at Pasaman regency is the society do not know the advantages of education and the opportunity to get education is stii low because they do not have much money to advance their educations.

Key Words: Responsibility, The Principle Right of Poor society